

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Kawasan Arktik merupakan wilayah regional yang mengelilingi Laut Arktik seluas 5.4 juta mil persegi yang hanya mendapat sinar matahari setiap 6 bulan setiap tahunnya dengan suhu rata-rata tidak melebihi 10 derajat celcius (NSIDC, 2020). Kawasan Arktik terdiri dari 8 negara yakni: Amerika Serikat (via Alaska), Denmark (via Greenland), Russia, Kanada, Norwegia, Finlandia, Swedia, dan Islandia, kelompok negara ini lebih dikenal sebagai Arctic 8. Sementara itu, terdapat negara pantai (*Coastal States*) yang berbatasan langsung dengan Laut Arktik yakni: Amerika Serikat (AS), Denmark, Russia, Kanada, Norwegia lebih dikenal sebagai kelompok Arctic 5.

Gambar 1 Peta Kawasan Arktik



Sumber: National Snow & Ice Data Center (NSIDC, 2020)

Kawasan Arktik menghangat lebih cepat daripada tempat lainnya di permukaan bumi, bahkan observasi satelit menunjukkan bahwa wilayah ini kehilangan sebagian besar lapisan esnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan terus berlanjut (Melia et al., 2017). Dalam laporan yang dikutip dari Richard Powell, seorang peneliti dari Scott Polar Research Institute, Arktik diprediksi akan sepenuhnya bebas es sekitar tahun 2040 atau 2050 (Bryce, 2019). Mencairnya es di kawasan Arktik tentu mengubah situasi geopolitik kawasan sebagai wilayah yang semula diabaikan karena sulitnya aksesibilitas manusia karena kondisi iklim yang ekstrim, kini muncul sebagai salah satu wilayah yang diperebutkan. Terbukanya Arktik (*Arctic Opening*) membuat kondisi kawasan penuh tantangan dan tidak dapat diprediksi (Emmerson, 2012).

Kawasan Arktik kini dilihat sebagai wilayah yang potensial dan krusial bagi negara Arktik maupun non-Arktik. **Pertama**, penelitian dari *US Geological Survey* menyatakan bahwa kawasan Arktik diperkirakan menyimpan 90 milyar barel minyak, 1.669 triliun kaki kubik gas alam, dan 44 milyar barel gas alam cair yang masih belum ditemukan (USGS, 2008). **Kedua**, Arktik memiliki letak strategis karena menghubungkan 3 benua sekaligus, yakni Eropa, Asia, dan Amerika sehingga terbukanya Arktik mendorong potensi munculnya jalur pelayaran baru seperti Northern Sea Route atau NSR di sepanjang pantai utara Russia atau Northwest Passage melalui Kanada. Mantan komandan *US Coast Guard* sekaligus perwakilan AS di Arktik di era Obama, Robert J. Papp, juga menyebut Arktik sebagai ‘taman belakang AS’ karena dinilai strategis untuk kepentingan ekonomi dan keamanan nasional serta navigasi (Weber, 2020). Keberadaan NSR dinilai dapat memangkas waktu, jarak, serta biaya pelayaran lebih rendah dibandingkan jalur pelayaran tradisional lainnya seperti Terusan Panama atau Suez (Rahman et al., 2014). Oleh karenanya, baik negara Arktik maupun non-Arktik saling berlomba untuk meninjau kembali strategi kebijakan luar negeri mereka di Arktik, tak terkecuali Amerika Serikat (Pincus, 2013). AS memiliki kepentingan dalam mendapatkan potensi rute pelayaran baru di Northwest Passage Kanada serta Northern Sea Route Russia berdasarkan persepsinya mengenai Laut

Arktik sebagai bagian dari perairan internasional dan kepentingan kebebasan navigasi atau FONOP-nya, potensi eksplorasi migas dan perpanjangan wilayah laut teritorial berdasarkan *Continental Shelf*. Perpanjangan wilayah laut teritorial berdasarkan *Continental Shelf* juga turut melegitimasi usaha negara untuk mengeksplorasi berbagai sumber daya alam didalamnya terutama dalam hal migas.

Keterlibatan AS di Arktik dimulai sejak pembelian Alaska di tahun 1867 dari Russia (Nilsson: Weingartner & Orttung, 2019). Kebijakan pertama AS di Arktik berawal di era Richard Nixon di tahun 1971 melalui *National Security Decision Memorandum 144* yang menjelaskan mengenai fokus AS di Arktik di 3 area yakni minimalisir resiko lingkungan, mempromosikan kerjasama di Arktik; dan memberikan perlindungan kepentingan keamanan kawasan. (Polar Initiatives, 2016). AS tidak memberikan pernyataan kebijakan Arktik apapun sejak saat itu hingga keikutsertaannya dalam *Arctic Environmental Protection Strategy* atau AEPS di tahun 1991 yang menjadi titik awal bagi pendirian Arctic Council melalui Ottawa Declaration 1996. Arctic Council merupakan sebuah forum tingkat tinggi antara Kanada, Denmark (Greenland), Finlandia, Islandia, Norwegia, Russia, Swedia, dan AS beserta kelompok pribumi (*Permanent Members*) serta organisasi internasional, beberapa negara non-Arktik, dan organisasi non-pemerintah lainnya (*Observers*) dengan tujuan untuk mempromosikan kerjasama antar negara Arktik beserta pelibatan komunitas pribumi dalam menghadapi isu-isu di Arktik terutama pembangunan berkelanjutan serta perlindungan lingkungan. Arctic Council yang tidak membahas mengenai isu keamanan, militer, dan maritim sehingga mendorong adanya inisiasi Arctic 5 melalui Illulissat Declaration 2008 yang merupakan forum *de facto* alternatif dari Arctic Council yang membahas mengenai isu lainnya di Arktik seperti eksplorasi sumber daya, sengketa perpanjangan wilayah teritorial, hingga keamanan militer dengan hanya beranggotakan 5 negara Arktik pantai (AS, Kanada, Russia, Norwegia, Greenland).

Sederet presiden AS pun mulai mengeluarkan kebijakan AS-Arktiknya tersendiri seperti halnya *National Security Presidential Directive 66* (NSPD-66) di era Bush,

National Security Strategy 2010 (NSS-2010) dan *National Strategy for the Arctic Region 2013 (NSAR-2013)* di era Obama I dan II, hingga *Departement of Defense Arctic Strategy 2016 (DOD 2016)* dan *Departement of Defense Arctic Strategy 2019 (DOD 2019)* di era Trump. Presiden Obama secara khusus mendeklarasikan AS sebagai negara Arktik dalam NSS-2010 dengan kepentingannya yang meliputi pencapaian keamanan nasional, perlindungan lingkungan, manajemen sumberdaya dan komunitas pribumi, penelitian ilmiah, serta kerjasama internasional dalam isu Arktik (Pincus, 2013). Kebijakan Obama di Arktik dirangkum dalam AS adalah negara Arktik ini memerlukan adanya kehadiran aktif AS di Arktik (Pincus, 2013). Kebijakan ini kemudian diperbarui dalam NSAR-2013 yang lebih menekankan pada respon AS terhadap tantangan dan potensi yang muncul akibat mencairnya es serta kondisi lingkungan global baru Arktik pada era Obama II tahun 2013-2016. Strategi yang digunakan Obama pun lebih mengutamakan peran institusi, kerjasama internasional, serta diplomasi untuk menjaga kawasan Arktik stabil dan bebas konflik (NSAR, 2013).

Pada perkembangan selanjutnya, kemenangan Donald Trump atas Hillary Clinton dalam Pemilu AS tahun 2016 berdampak pada perubahan arah kebijakan luar negeri AS selanjutnya. Kebijakan Trump di Arktik diawali dengan memperbarui NSAR-2013 Obama ke dalam DOD 2016 untuk merespon perubahan signifikan dalam keamanan internasional saat itu. Strategi ini bertujuan untuk stabilisasi kawasan, keamanan kepentingan AS, kerjasama internasional dalam merespon tantangan di Arktik serta beroperasi bersama aliansi atau secara independen jika diperlukan. Tujuan ini dicapai dengan memperkuat pertahanan keamanan nasional AS di dalam dan luar negeri, aliansi dan kerjasama strategis, meningkatkan kapabilitas militer dan infrastruktur di Arktik, hingga dukungan terhadap institusi internasional (DOD, 2016). Meskipun demikian, strategi Arktik AS di era Trump kembali mengalami perubahan pasca meningkatnya pengaruh China dalam forum regional Arktik serta meningkatnya aktivitas militer Russia di sepanjang pantai utaranya melalui DOD 2019. DOD 2019 secara khusus melihat Arktik sebagai ‘koridor antara Indo-Pasifik dan Eropa’ serta arena kompetisi strategis antara kekuatan hegemon China dan Russia (DOD, 2019).

China secara resmi masuk sebagai negara pengamat (*Observer*) dalam Arctic Council sejak tahun 2013 sehingga memungkinkannya untuk terlibat dalam isu di kawasan regional Arktik. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan terbitnya *China's Arctic Policy* di tahun 2018 yang mendeklarasikan China sebagai negara dekat Arktik (Weber, 2020). Di sisi lain, Russia adalah pemimpin regional Arktik. Hal ini didukung dengan langkah militernya yang dinilai agresif dan kontroversial seperti halnya penempatan armada utara dengan kapabilitas kapal pemecah es terbesar di dunia yang disebar di Laut Arktik serta sepanjang rute NSR (Aliyev, 2019).

Berdasarkan hal ini, AS memiliki perbedaan pendekatan dan kebijakan luar negeri dalam mencapai kepentingan keamanan nasionalnya dalam menghadapi isu Arktik yang dipengaruhi oleh perubahan di lingkungan internal dan eksternal, seperti seiring pergantian masa kepemimpinan presiden serta adanya perubahan situasi geopolitik kawasan. Terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan luar negeri AS di Arktik yakni memberikan kehadiran yang aktif (*Active Presence*) terutama melalui pembangunan infrastruktur dan kapabilitas militer dengan implementasinya di kawasan yang tertinggal jauh dibandingkan dengan negara Arktik lainnya terutama Russia. Pemerintahan Obama II diwarnai dengan banyak peran institusi, kerjasama internasional, serta pendekatan yang lebih diplomatis dibandingkan dengan pemerintahan Trump. Kondisi dipengaruhi oleh persepsi Obama dan Trump mengenai Arktik, kepentingan AS, serta perubahan kondisi lingkungan eksternal pada saat itu. Faktor ini kemudian membentuk bagaimana seorang pemimpin mengambil sikap dan kebijakan luar negeri yang diambil sekaligus menentukan instrumen yang digunakan dalam implementasinya.

Perbedaan kebijakan luar negeri antara Obama dan Trump juga terlihat pada kasus Northwest Passage yang menjadi sengketa antara AS yang mengklaimnya sebagai selat internasional dan Kanada yang menegaskan sebagai bagian dari perairan internal historis hingga saat ini (Lajeunesse & Huebert, 2019). Selain itu, sebagai negara yang juga berbatasan langsung dengan Laut Arktik melalui Alaska, AS juga berhak untuk mengklaim perpanjangan wilayah atas dasar lempeng benua (*Continental*

Shelf) hingga 350 mil sesuai regulasi UNCLOS 1982 dan sesuai dengan kepentingannya dalam mencapai kebebasan navigasi atau FONOP. Kendati demikian, diskusi mengenai masa depan ratifikasi AS terhadap *United Nations Convention on the Law of the Sea* atau UNCLOS 1982 belum menemukan titik terang baik dari pemerintahan Obama maupun Trump. Oleh karena itu selama AS belum meratifikasi UNCLOS 1982, hak AS untuk mengajukan klaimnya di *Commission on the Limits of the Continental Shelf* atau CLCS tidak dijamin bisa didapatkan (Almond, 2017).

Penelitian terdahulu mengenai isu di Arktik telah banyak dilakukan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Arktik berkembang menjadi kawasan strategis dalam beberapa tahun terakhir sehingga membuat negara saling meninjau ulang kebijakan luar negerinya seperti halnya AS di era Obama II dan Trump. Kendati demikian, implementasi kebijakan luar negeri AS masih tertinggal dibandingkan dengan negara lainnya terutama dari segi kapabilitas militer dan aktivitasnya di Arctic Council meskipun dinilai memiliki kepentingan yang jelas di Arktik. Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis menggunakan referensi beberapa artikel ilmiah dari penelitian terdahulu sebagai acuan yang dijelaskan secara terperinci.

Ketika membahas mengenai kebijakan Arktik-AS di era Obama II dan Trump, penulis perlu memahami sejarah awal dari kebijakan itu sendiri yang dimulai dari Presiden Bush melalui NSPDD-66 untuk kemudian dilanjutkan oleh Obama I melalui NSS-2010 dan NSAR-2013 di masa Obama II, serta pada pemerintahan Trump melalui DOD 2016 dan DOD 2019. Hasil dari beberapa penelitian terdahulu mengenai kebijakan AS-Arktik di era Obama dan Trump banyak menyebutkan bahwa terdapat perbedaan kebijakan, dan pendekatan yang digunakan. Menurut Pincus, implementasi kebijakan AS di Arktik dapat dilihat pada keberadaan *US Coast Guard*, *US Icebreakers*, dan *US Navy*. Pemerintahan Obama I menerbitkan NSS-2010 mengenai prioritas AS di Arktik, yakni keamanan nasional, perlindungan lingkungan dan komunitas pribumi, serta kerjasama internasional. Meskipun AS memiliki kepentingan nasional di Arktik, sumber daya yang diperlukan untuk merealisasikannya tidak mencukupi. Terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan AS dan implementasinya di

Arktik yang dianalisa menggunakan model kebijakan luar negeri adaptif dari Rosenau yakni kebijakan luar negeri yang dihasilkan AS dari masing-masing presiden adalah respon terhadap perubahan di lingkungan internal dan eksternal. Hasil dari asumsi ini adalah pemerintah, yakni Kongres dan White House mungkin setuju diperlukannya kehadiran aktif AS di Arktik, namun mereka berbeda pandangan mengenai caranya sehingga hasil tidak maksimal.

AS dinilai mengalami ‘ketertinggalan’ dari negara besar lainnya baik yang dapat diukur maupun simbolik. AS masih kesulitan untuk meningkatkan kehadiran aktifnya di Arktik sebab keterbatasan anggaran untuk *US Coast Guard* dan kurangnya armada kapal pemecah es atau *US Icebreakers* atau kapal pemecah es serta permainan politik birokrasi di tingkat federal. Lambannya kapabilitas AS di Arktik dinilai tidak rasional, hal ini disebabkan karena lemahnya struktur organisasi dan birokrasi politik sehingga membuat Russia dan China sudah lebih unggul daripada AS dari segi kapabilitas militer dan pengaruh aktif mereka di Arktik. Perbedaan kebijakan luar negeri Arktik AS juga dipengaruhi oleh kepribadian dan preferensi Obama dan Trump, pandangan mengenai isu lingkungan dan perubahan iklim, serta persepsi ancaman dari aktivitas Russia dan China (Weingartner & Orttung, 2019). Hal ini dijelaskan melalui konseptualisasi *Two-Level Game*, yakni politik domestik dan politik internasional saling bersinggungan satu dengan lainnya, namun, penting diketahui kapan hubungan keduanya perlu diperhatikan. Menurut Weingartner & Orttung, karakteristik personal presiden dalam isu perubahan iklim, prioritas penelitian ilmiah, serta respon terhadap kompetisi kekuatan hegemon membentuk pendekatan kebijakan yang akan diambil oleh presiden.

Lebih lanjutnya, perbedaan signifikan antara Obama dan Trump terlihat dari penggunaan Arctic Council sebagai instrumen kebijakan luar negeri di Arktik. Kedua presiden memiliki pendekatan berbeda dalam proses pengambilan kebijakan di Arktik. Obama mendahulukan peran institusi Arctic Council dan diplomasi sebagai instrumen kebijakan Arktiknya, termasuk pada Russia dan China. Di sisi lain, Trump melakukan langkah yang lebih agresif seperti mengubah kebijakan Obama dan melangkahi peran

institusi. Pandangan presiden mengenai posisi perubahan iklim dan keterlibatan kekuatan eksternal di Arktik sangat membentuk perbedaan kebijakan Arktik mereka. Obama dan Trump mengakui adanya potensi ancaman bagi keamanan nasional akibat peningkatan aktivitas Russia dan China, namun mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam meresponnya.

Perbedaan respon antara Obama dan Trump juga terlihat dalam kasus Northwest Passage di Kanada. Menurut Lajeunesse & Huebert, terdapat perbedaan pandangan mengenai Northwest Passage antara AS dan Kanada. Pemerintahan Kanada mengakui Northwest Passage sebagai perairan internal historis. Di sisi lain, AS di masa Trump menganggapnya sebagai bagian dari selat internasional yang sejalan dengan kepentingan kebebasan navigasi AS yakni *Freedom of Navigation Operation* (FONOP) di Northwest Passage. FONOP menjadi instrumen efektif bagi kebijakan luar negeri AS yang dinilai cukup agresif serta berguna untuk memberikan pernyataan politik kuat dalam suatu sengketa maritim sejak masa Perang Dingin (Lajeunesse & Huebert, 2019). Kendati demikian, implementasi FONOP AS dibawah Trump pada Northwest Passage berpotensi merusak hubungan diplomatis yang dibangun sejak lama antara AS dan Kanada. Hal ini disebabkan karena praktik kebijakan luar negeri AS oleh Trump tidak mencerminkan prinsip saling menghormati yang telah lama ada antar kedua negara. Kanada dan AS sangat menghindari konfrontasi langsung untuk menjaga *status quo* yang saling menguntungkan pada hubungan bilateral mereka selama ini. Artikel ini menyatakan bahwa sengketa Northwest Passage di era baru ini berpotensi menggeser hubungan bilateral AS-Kanada dari diplomatis menjadi krisis politik.

Klaim Kanada atas Northwest Passage sebagai perairan internal historis secara jelas menegaskan bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari kedaulatan maritim Kanada yang tidak dapat digunakan untuk kepentingan transit kapal-kapal asing. Meskipun AS mengakui laut teritorial Kanada sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, wilayah laut teritorial sepanjang 12 mil itu tumpang tindih dengan selat internasional selebar 24 mil. Selat inilah yang diakui AS untuk kebijakan FONOP-nya untuk kepentingan rute ekonomi komersial serta kekuatan keamanan globalnya.

Kendati demikian, Kanada tidak memiliki kapabilitas untuk menghentikan aktivitas kapal selam nuklir AS, terlebih menghentikan kapal pemecah es atau kapal perang. Hal ini disebabkan karena penghentian operasional kapal-kapal ini membutuhkan persetujuan pemerintah atau dewan terkait sehingga Kanada bergantung pada sistem denda yang dimuat dalam *Northern Canada Vessel Traffic Services Zone Regulations 2010* atau NORDREG untuk melindungi wilayah teritorialnya hingga saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diperoleh garis besar bahwa terdapat perbedaan kebijakan Arktik-AS di era Obama II dan Trump serta pandangan mereka mengenai kawasan Arktik. Salah satu hal yang menjadi perhatian bagi kebijakan Arktik-AS adalah pengaruh Russia sebagai pemimpin regional kawasan Arktik. Sebagai negara yang menguasai sebagian besar kawasan Arktik, Russia meningkatkan aktivitasnya untuk menegaskan posisinya di Arktik yang dapat dilihat dari jumlah armada utara (*Northern Fleet*) ataupun revitalisasi Northern Sea Route atau NSR sebagai jalur pelayaran alternatif baru.

Kawasan Arktik tengah mengalami perubahan yang tidak dapat diprediksi secara alam, sosial, dan ekonomi sehingga memengaruhi pola tindakan atau perilaku dari negara serta pergeseran fokus perhatian global di Arktik sejak berakhirnya Perang Dingin dari konfrontasi antar negara hegemon menjadi isu perubahan iklim (Pilyasov et al., 2015). Dampak terbesar perubahan iklim terjadi di Laut Arktik yang menyebabkan aktivitas navigasi meningkat secara signifikan sekaligus menyebabkan aksesibilitas negara pantai semakin mudah. Meningkatnya aktivitas navigasi akan berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi seperti halnya pelayaran kapal pesiar atau permintaan yang tinggi terhadap sumber daya hidrokarbon oleh negara industrialis besar seperti AS, Eropa Barat, dan Kanada, serta negara industrialis baru seperti China, India, dan Vietnam. Hal ini menyebabkan isu keamanan di Arktik berubah dari militer dan ekspansi menjadi ekonomi, lingkungan, dan keamanan energi global (Pilyasov et al., 2015).

Menurut Pilyasov, Arktik besar cenderung berfokus pada isu kedaulatan dan keamanan maritim sedangkan negara Arktik kecil (Swedia, Islandia, Finlandia) cenderung berfokus pada ancaman perubahan iklim. Berdasarkan hal ini, isu keamanan yang terjadi di Arktik menjadi lebih luas dari sekedar militer sehingga munculnya konsep *Radical Reinterpretation*. Hal ini diartikan sebagai masuknya satu anggota dalam suatu politik non-konfrontasi dan kerjasama merupakan sebuah kemenangan bersama. Berbeda halnya saat Perang Dingin dimana masuknya satu anggota berarti kekalahan bagi pihak lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sikap interdependensi antar negara anggota ketika negara saling menurunkan resiko konfrontasi militer sehingga berbagai negara Arktik mulai meninjau ulang kebijakan luar negeri mereka, termasuk Russia. Artikel ini menyatakan bahwa Russia tidak maksimal dalam memanfaatkan pengaruhnya dalam forum Arctic Council karena dipengaruhi beberapa sebab yakni krisis politik dan ekonomi yang membuat anggaran pada proyek di utara menghilang, adanya privatisasi properti oleh berbagai perusahaan swasta, kelompok pribumi mulai aktif karena proses demokratisasi dan nasionalisasi, isu lingkungan, konservasi, dan warisan budaya menjadi hal penting bagi kelompok pribumi. Hal ini pun termasuk dalam fokus kebijakan Arktik Russia yakni revitalisasi NSR yang implementasinya masih dalam koordinasi buruk baik dari sisi korporasi dan institusi. Di sisi lain, penelitian ini berfokus untuk menganalisa kebijakan Arktik-AS di era Obama II dan Trump sehingga sebagai pemimpin regional di Arktik, artikel ini menjelaskan bahwa Russia juga masih memiliki tantangan dan kendala birokrasi politiknya yang dipengaruhi oleh pengalaman transisinya dari Soviet. Pilyasov juga menekankan bahwa isu keamanan di era globalisasi tidak lagi membahas mengenai militer, namun perubahan lingkungan dimana diplomasi melalui institusi sangat diperlukan bagi negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Selain Russia dan Kanada, salah satu pemain penting di kawasan Arktik adalah Denmark yang mendapatkan legitimasinya atas Arktik melalui Greenland. Dalam hal ini, Jacobsen menyoroti bagaimana langkah, kebijakan, serta keuntungan Greenland dalam memperjuangkan kedaulatannya di Arktik. Letak geografis Greenland yang

sangat dekat dengan Arktik dan sebagai bagian dari Kerajaan Denmark menjadi alat utama legitimasinya di kawasan tersebut serta memperkuat posisinya sebagai salah satu negara utama di Arktik dan mendapat sebuah keuntungan. Arktik pun menjadi bagian dari Lima Prioritas Utama dari fokus kebijakan luar negeri Denmark di tahun 2017-2018. Namun di sisi lain, pemerintahan Greenland ingin mendapatkan kedaulatan tersendiri dari Denmark karena perbedaan identitas suku yang mayoritas dihuni oleh 90% komunitas Inuit (Jacobsen, 2019). Hal ini menyebabkan salah satu fokus kebijakan luar negeri Greenland adalah mendapatkan pengakuan dan status internasionalnya. Menurut Jacobsen, langkah Greenland dalam mengamankan klaim wilayahnya di Laut Arktik tidak terlepas dari pengaruh Denmark dan visinya sebagai menjadi negara independen bebas. Hal ini menyebabkan Greenland berusaha memaksimalkan potensinya melalui kerangka hukum yang ada saat ini secara individual baik dari, wawancara, atau tanda simbolik agar menekan keterlibatan Denmark sehingga dapat mencapai kedaulatannya tersendiri.

Denmark masih membutuhkan Greenland dalam mewujudkan kepentingan utamanya di Arktik sebagai arena strategis secara keamanan dan ekonomi. Namun di sisi lain, Greenland berusaha menekan keterlibatan Denmark dalam kebijakan luar negerinya sebagai usaha dalam mencapai kedaulatannya tersendiri. Hal ini dicapai Greenland melalui langkah-langkah forum yang tersedia baik formal dan informal seiring dengan mematuhi kerangka internasional yang sudah ada. Berdasarkan hal ini, perbedaan antara artikel ini dan penelitian yang ingin dilakukan adalah fokus perbedaan kebijakan luar negeri Arktik AS di era Obama II hingga Trump. Artikel dari Jacobsen ini membantu penulis dalam memahami posisi Greenland dalam isu Arktik secara geopolitik serta dinamika yang terjadi di tingkat domestik. Hal ini juga mendukung asumsi posisi strategis Greenland di Arktik yang menyinggung langkah Trump ketika membuat pernyataan politik keinginannya untuk membeli Greenland pada tahun 2019 lalu (Pengelly, 2019).

Penulis kemudian menggeser fokus pembahasan dari perbedaan kebijakan luar negeri AS-Arktik menuju dinamika geopolitik di kawasan Arktik. Mencairnya es di

Arktik akibat pemanasan global mengubah situasi geopolitik kawasan yang sebelumnya terisolir dari aktivitas manusia kini menjadi diperebutkan oleh berbagai negara. Beberapa artikel menyebutkan bahwa adanya perubahan dan potensi peningkatan aktivitas militerisasi di Arktik yang disebabkan oleh aktivitas Russia, masuknya China sebagai negara Observer, serta sejumlah data yang menyebutkan adanya potensi cadangan migas yang belum pernah tereksplorasi yang tersebar di kawasan Arktik. Beberapa penelitian dibawah ini menegaskan bahwa Arktik merupakan kawasan krusial dan strategis sehingga negara mulai meningkatkan kapabilitas militernya untuk memberikan efek kehadiran yang aktif di Arktik. Kehadiran yang aktif ini diimplementasikan negara dalam bentuk kebijakan maritim hingga peningkatan jumlah armada laut terutama kapal pemecah es beserta agensi laut terkait. Beberapa artikel dibawah ini menjelaskan perkembangan isu kawasan Arktik dan pandangan antara dua kekuatan besar (AS-Russia), negara Skandinavia, hingga peran EU sebagai bagian dari Observer di Arctic Council dalam meningkatkan kehadiran aktifnya di kawasan.

Menurut Østhagen, peran Uni Eropa (EU) di Arktik yang lebih menekankan pada dimensi kesadaran (*Awareness*) dan dukungan (*Support*) daripada terlibat secara geopolitik. Artikel ini juga berargumen bahwa penyebab konflik di Arktik seperti perpanjangan territorial, potensi sumber daya, dan perlombaan menuju Kutub Utara sangatlah terbatas karena hanya bersifat simbolik (Østhagen, 2017). Artikel ini menyoroti perkembangan Arktik sebagai ‘perbatasan baru energi dunia’ dan ‘arena konflik geopolitik selanjutnya’. Para ahli mendukung prediksi bahwa Arktik merupakan arena konflik terbaru dalam waktu dekat (*Imminent Conflict*) yang didapat melalui analisis secara empiris dengan menempatkan Russia sebagai aktor utama. Potensi konflik di Arktik bukan dipicu atas perebutan sumber daya alam atau dinamika keamanan kawasan, melainkan hanya sebagai usaha simbolik.

Dari hasil temuan artikel ini, peran Uni Eropa (EU) dalam isu Arktik jelas namun terbatas karna tidak memiliki akses langsung terhadap Laut Arktik. Kendati demikian, EU tetap berperan dalam hal regulasi dan akses pasar dan hubungan dengan

negara Arktik lainnya yang juga dimuat dalam beberapa dokumen strategis sehingga dinilai memiliki ‘kepentingan yang ditunggangi’ ketika berpartisipasi dalam isu Arktik karena dipengaruhi oleh kepentingan internal dan aspirasi kebijakan lainnya terutama dalam menggunakan Arktik sebagai simbol perubahan iklim atau arena kompleksitas rezim. Oleh karena itu, EU selalu mengaitkan hubungannya di Arktik dengan keberadaan Russia sebagai salah satu negara anggotanya. Perbedaan yang menjadi fokus dari penelitian penulis adalah perbedaan kebijakan luar negeri AS di era Obama II dan Trump sehingga artikel ini membantu penulis dalam memahami posisi dan peran EU sebagai salah satu pihak Observer di forum Arctic Council. Kekurangan dalam artikel ini adalah melupakan asumsi bahwa kawasan Arktik terus berubah seiring dengan efek perubahan iklim. Hal ini menjadikan Laut Arktik menjadi zona strategis yang dapat diperebutkan oleh negara pantai, terutama Russia. Kekuatan Russia sebagai pemimpin regional Arktik berpengaruh pada kebijakan negara Arktik dan non-Arktik lainnya karena dampak dari mencairnya es di Arktik juga turut mengubah postur keamanan global.

Di sisi lain, Roucek melihat letak Arktik yang sangat strategis karena kedekatan jarak antara dua kekuatan besar nuklir pada saat itu yaitu AS dan Soviet serta menghubungkan letak dua kontinen besar yakni Amerika Utara dengan Eurasia sehingga secara geopolitik. Akibat dari letak Arktik yang strategis dan adanya peningkatan aktivitas militer oleh AS-Soviet, negara-negara Skandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia, Islandia, Finlandia) mempersepsikan hal tersebut sebagai ancaman. Kekhawatiran negara-negara Skandinavia ini membuat mereka turut membangun pangkalan militer yang mencakup persenjataan berupa kapal selam dan pesawat tempur pada saat itu (Roucek, 1983).

Roucek menyoroti adanya ‘kepribadian ganda’ dari negara-negara Skandinavia yang menyandang prinsip netralisme tetapi di sisi lain masih meningkatkan pembangunan pertahanan mereka akibat meningkatnya aktivitas militer antara AS dan Soviet di Arktik (Roucek, 1983). Persepsi Arktik sebagai kawasan strategis dan sebagai penghubung antar dua basis kekuatan besar hingga saat ini mendorong AS harus

memperkuat kehadirannya di Arktik, terutama ditengah aktivitas militer Russia yang terus meningkat. Artikel ini juga memberikan gambaran bagaimana Arctic 8 termasuk negara Skandinavia seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark yang terus membangun pangkalan militer mereka. Padahal disaat yang bersamaan, negara Skandinavia merupakan negara yang mengusung prinsip netralitas sehingga artikel ini menyebutnya sebagai ‘kepribadian ganda’ karena persepsi ancaman yang diberikan oleh Russia maupun AS. Artikel ini membantu penulis dalam memahami situasi geopolitik Arktik pasca Perang Dingin dan bagaimana kekuatan AS-Russia sangat memengaruhi situasi geopolitik kawasan hingga saat ini. Artikel ini juga membantu penulis dalam memahami bagaimana Laut Arktik merupakan ruang vital bagi pertumbuhan aktivitas militer negara pantai.

Peningkatan aktivitas militer dari negara pantai bukan disebabkan oleh sengketa wilayah territorial ataupun perebutan sumber daya alam (Jayanti & Utomo, 2019). Teori realisme defensif menjelaskan bahwa adanya aktivitas militer di kawasan Arktik dilakukan sebagai bagian usaha sebuah negara untuk mencapai ‘keamanan maksimal’ dan bertahan hidup ditengah kondisi sistem internasional yang anarki. Kelima negara Arctic 5 mengalami dilema keamanan dimana dalam menghadapi itu, mereka harus meningkatkan 6 kapabilitas (ukuran populasi dan kedaulatan, sumber daya alam, ekonomi, militer, stabilitas politik, kompetensi) untuk mencapai keamanan maksimal. Kekuatan militer di Arktik harus dilakukan oleh masing-masing negara Arctic 5 karena mencairnya es membuat kawasan tersebut rentan sehingga dibutuhkan penempatan arsenal untuk menjaga perbatasan negara (Jayanti & Utomo, 2019).

Permasalahan di Arktik muncul ketika kelima negara Arctic 5 yakni AS, Denmark, Kanada, Norwegia, Russia saling mengklaim perpanjangan wilayah territorial yang saling tumpang tindih di Laut Arktik atas dasar *Continental Shelf* dalam UNCLOS 1982. Hal ini didasari dari data USGS tahun 2008 mengenai adanya potensi migas yang belum pernah dieksplorasi manusia di kawasan Arktik serta langkah kontroversial Russia ketika meletakkan bendera nasionalnya di dasar Lomonosov Bridge sebagai salah satu daerah yang diperebutkan. Artikel ini membahas bagaimana

Russia sebagai aktor paling dominan di Arktik akibat penempatan berbagai perangkat militernya di kawasan tersebut seperti armada kapal pemecah es, kapal selam, serta dokumen *Russian Federation Policy for the Arctic to 2020* dengan pembangunan berbagai pangkalan militer disepanjang pantai utaranya. Di sisi lain, AS juga turut meningkatkan alokasi militernya di negara bagian Alaska serta pembangunan pangkalan militer di sekitar kawasan Arktik meskipun AS belum meratifikasi UNCLOS 1982. Perbedaan mendasar antara artikel ini dengan penelitian yang dilakukan adalah fokus pada perbedaan kebijakan luar negeri AS di Arktik pada era Obama II hingga Trump. Penelitian yang ingin dilakukan bertujuan untuk menganalisis bagaimana perbedaan kebijakan luar negeri Arktik-AS di era Obama II dan Trump. Kekurangan artikel ini terletak pada pengabaian faktor keterlibatan individu dalam perumusan kebijakan keamanan dan militer. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi faktor pengaruh aktor individu serta pentingnya kawasan Arktik.

Seperti halnya dengan kawasan Asia Tenggara yang memiliki ASEAN ataupun kawasan Eropa yang memiliki EU, Arktik juga memiliki struktur pemerintahan kawasannya tersendiri yakni Arctic Council. Keberadaan Arctic Council dinilai sangat krusial karena berfungsi sebagai forum antar kedelapan negara Arktik untuk membahas isu lingkungan, kerjasama, penelitian, kesejahteraan, dan pembangunan. Selain itu, Arctic Council juga terdiri dari *Permanent Members* yakni terdiri dari komunitas adat di kawasan Arktik yang memiliki posisi penting dalam setiap deklarasi yang dilakukan dalam Arctic Council. Tidak hanya komunitas adat, Arctic Council juga mengakui keterlibatan dari negara Observer, yakni negara non-Arktik yang ingin terlibat dalam kawasan seperti halnya China dan Singapura. Beberapa penelitian berikut menemukan adanya pengaruh kuat dari Arctic Council sebagai forum antar-pemerintah terkuat di Arktik. Kendati demikian, beberapa artikel juga menyatakan bahwa Arctic 5 merupakan forum yang paling kuat di Arktik karena membahas mengenai isu keamanan, militer, serta maritim yang tidak dibahas dalam Arctic Council. Hasil penelitian dari beberapa artikel ini membahas mengenai perbedaan peranan antara

Arctic Council dan Arctic 5 di kawasan Arktik serta bagaimana negara non-Arktik memanfaatkan forum ini untuk ikut terlibat dalam isu kawasan.

Peran Arctic Council dalam isu Laut Arktik yang dibahas dalam 3 perdebatan dari tahun 1996 hingga 2010 (Pedersen, 2012). Kerjasama negara Arktik mulai berkembang sejak tahun 1980-an seiring berkembangnya Laut Arktik menjadi arena militer strategis sekaligus arena kekhawatiran internasional pada perubahan lingkungan. Hal ini diawali dengan kerjasama *Arctic Environmental Protection Strategy* (AEPS) di tahun 1991 yang berkembang menjadi Arctic Council, yakni sebuah forum tingkat tinggi antara Kanada, Greenland, Finlandia, Islandia, Norwegia, Russia, Swedia, dan AS dengan tujuan untuk mempromosikan kerjasama antar negara Arktik beserta pelibatan komunitas pribumi dalam menghadapi isu-isu di Arktik terutama pembangunan berkelanjutan serta perlindungan lingkungan melalui Ottawa Declaration di tahun 1996. Kendati demikian, deklarasi Arctic Council tidak memiliki suatu administrasi perjanjian legal yang mengikat bagi negara anggotanya dalam mengambil suatu keputusan karena bergantung pada mekanisme konsensus serta tidak membahas isu keamanan militer. Keterbatasan Arctic Council ini menyebabkan negara pantai (AS, Kanada, Russia, Norwegia, dan Denmark) membentuk forum Arctic 5 melalui Illulissat Declaration tahun 2008 untuk membahas mengenai isu keamanan militer, keamanan, dan maritim.

Dari temuan artikel ini, AS melihat Arctic 5 dan Arctic Council memiliki peran dalam isu yang berbeda. Hal ini menyebabkan eksklusifitas negara anggota dalam Arctic 5 tidak merusak hubungan negara dalam Arctic Council sehingga AS lebih condong dalam format Arctic 5 pada awal berdirinya. Perubahan sikap AS menuju Arctic Council mulai terlihat di era Obama I ketika Secretary of State, Hillary Clinton menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Arctic Council pertama kalinya. Hillary Clinton menyebut Arctic Council sebagai forum terbaik bagi keberlangsungan kerjasama internasional di Arktik. Perbedaan antara artikel ini dengan topik penelitian yang diajukan adalah fokus penelitian mengenai kepentingan nasional AS yang dicapai melalui kebijakan luar negerinya di era Obama II dan Trump. Artikel ini membantu

penulis dalam memahami peninggalan kebijakan Arktik AS di era Obama I untuk kemudian dianalisa pengaruhnya di era kepresidenan selanjutnya. Artikel ini juga membantu penulis dalam memahami bagaimana AS menggunakan Arctic Council dan Arctic 5 sebagai instrumen kebijakan luar negerinya di Arktik serta pengaruh lingkaran pembuat kebijakan secara individu beserta kepentingan yang dibawanya bagi presiden.

Kendati demikian, terdapat dinamika yang terjadi dalam Arctic Council dan struktur pemerintahan di Arktik. Menurut Ingimundarson, terdapat tensi antara integrasi institusi dan politik dalam Arctic Council yang dipengaruhi oleh negara Arktik maupun non-Arktik. Adanya keinginan dari Arctic Council untuk meningkatkan keberadaan posisi internasionalnya dengan membuka keanggotaan bagi aktor non-regional tanpa mengabaikan posisi negara anggota Arctic 8 namun berdampak pada masuknya China dan EU dengan segala kepentingannya dalam menjalin hubungan bilateral dengan negara anggota baik dalam isu politik atau ekonomi. Arctic Council dinilai masih menjadi kerangka integrasi antar-pemerintah yang paling berpengaruh di Arktik. Kendati demikian, artikel ini berargumen bahwa meskipun regionalisme dan perjanjian antar-pemerintah meningkat, kerjasama regional Arktik sulit dibentuk karena keberagaman kepentingan dan aktor justru menjadi faktor penghambat integrasi dalam Arctic Council. Keanggotaan Arctic Council memiliki peran dalam menjaga kedaulatan dan kehadiran regionalnya tersendiri, namun di sisi lain, Arctic Council ditekan untuk tetap memberikan suara bagi kelompok pribumi mengenai dampak perubahan iklim di wilayahnya. Hal inilah yang disebut Ernst B. Haas sebagai ‘*Turbulence*’ yakni kondisi dimana setiap aktor saling bergantung satu dengan lainnya namun untuk mencapai tujuannya masing-masing. Hal ini menyebabkan tujuan bersama yang ingin dicapai tidak saling kompatibel (Ingimundarson, 2014).

Dari hasil temuan artikel ini, faktor penghambat integrasi paling signifikan di Arctic Council adalah ketika negara besar seperti AS, Kanada, dan Russia selalu menggunakan hak veto *de facto*-nya untuk membatalkan suatu perjanjian atau perubahan secara fundamental, Arctic Council belum menjadi badan otoritas dengan kapabilitas institusional memadai untuk mengatur regulasi di Arktik, tidak

dimasukkannya isu keamanan militer dalam topik pembahasan Arctic Council, adanya perbedaan hierarki antar negara dan kelompok pribumi, serta adanya kekhawatiran masuknya negara-negara Observer akan melemahkan pengaruh politik negara Arctic Council itu sendiri terhadap kelompok pribumi. Perbedaan artikel ini dari penelitian yang dilakukan adalah berfokus pada perbedaan kebijakan luar negeri Arktik-AS di era Obama II dan Trump. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini membantu penulis untuk memahami faktor penghambat integrasi dalam Arctic Council beserta dinamikanya. Artikel ini membantu penulis untuk memahami adanya struktur hierarki dalam Arctic Council antara kelompok Arctic 5, Arctic 3, dan kelompok pribumi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya regulasi mengikat dan sistem pengambilan keputusan yang kuat dalam Arctic Council. Tidak dibahasnya isu militer dan sistem pengambilan keputusan secara konsensus juga turut memengaruhi integrasi di Arctic Council. Artikel ini juga membantu penulis dalam memahami posisi EU dan China sebagai *Observer* serta cara mereka untuk terlibat dalam isu di Arctic Council. Lebih lanjut, artikel ini membantu penulis untuk menganalisa posisi Arctic Council sebagai instrumen kebijakan luar negeri AS di Arktik serta bagaimana AS menggunakan kekuatannya didalamnya.

Setelah memahami mengenai perbedaan peran antara Arctic Council dan Arctic 5, penulis perlu memahami bagaimana hukum internasional laut UNCLOS 1982 berlaku di kawasan Arktik. Salah satu isu yang juga menjadi kepentingan AS dan negara Arktik lainnya adalah perpanjangan wilayah laut teritorial berdasarkan *Continental Shelf* yang mengacu pada Pasal 76 UNCLOS 1982. Perpanjangan wilayah laut teritorial dapat memberikan negara akses pada sumber daya alam dibawah laut beserta garis perbatasan yang baru. Oleh karena itu, negara berusaha untuk melakukan penelitian guna mendapatkan data ilmiah yang kuat untuk kemudian diajukan pada CLCS, yakni badan dari UNCLOS yang berfungsi untuk menetapkan klaim negara berdasarkan *Continental Shelf*. Kendati demikian, isu yang mengelilingi perpanjangan wilayah teritorial ini tidak terlepas dari sengketa tumpang-tindih (*Overlapping Claims*) antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam hal ini, kelompok negara Arctic 5 atau

negara yang memiliki akses langsung ke Laut Arktik saling berusaha untuk mengklaim perpanjangan wilayah teritorialnya atas dasar *Continental Shelf*.

Keberadaan *Continental Shelf* ini menjadi salah satu faktor usaha perebutan wilayah teritorial dari Laut Arktik yang diklaim oleh Russia, Kanada, Denmark, Norwegia, dan AS (Carlson et al., 2013). Konflik teritorial berhubungan dengan erat dengan konflik militer sehingga salah satu solusi yang ditawarkan untuk menghindari perang adalah melalui penyelesaian institusi neo-liberal yakni UNCLOS 1982. Negara pantai memiliki hak untuk melakukan eksplorasi sumber daya berdasarkan *Continental Shelf* namun masih terdapat lapisan kedaulatan lainnya diluar batas yang telah diklaim yang merupakan hak bagi masyarakat internasional sehingga disebut sebagai yurisdiksi merayap (*Creeping Jurisdiction*) yakni kondisi adanya berbagai lapisan otoritas kedaulatan diluar hak negara pengklaim yang diimbangi dengan kebutuhan komunitas internasional sehingga kedaulatan negara menebal di wilayah yang yurisdiksinya belum lengkap (Carlson et al., 2013). Kondisi ini menyebabkan adanya tumpang tindih yang melanggar hukum kedaulatan yang diklaim negara lainnya sehingga UNCLOS 1982 memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang terdiri dari dua sistem yaitu *Dispute Settlement System* (DSS) dan *Dispute Settlement System* (DSS). Dari penemuan artikel ini, adanya wilayah teritorial baru mendorong munculnya masalah ‘kedaulatan berlapis’ dan potensi konflik militer. Berdasarkan hal ini, perbedaan mendasar dari artikel ini dengan penelitian yang dilakukan adalah fokus pada perbedaan kebijakan luar negeri Arktik-AS di era Obama II hingga Trump. Artikel ini membantu penulis dalam memahami adanya permasalahan klaim tumpang tindih antar negara pantai di Laut Arktik sebagai salah satu kepentingan keamanan nasional yang diperjuangkan AS.

Berdasarkan penjabaran di atas, kawasan Arktik kini mengalami perubahan yang cepat dan tidak dapat diprediksi seiring dengan mencairnya es akibat perubahan iklim. Sebagai kawasan yang semula terisolir dan jauh dari pengaruh manusia, Arktik kini muncul sebagai wilayah krusial dan strategis bagi tidak hanya negara Arktik dan non-Arktik tapi juga keseluruhan masyarakat internasional sehingga dipandang sebagai bagian dari isu global. Dalam hal ini, sebagai salah satu kekuatan hegemon di kawasan

dan dunia internasional, AS dinilai memiliki kepentingan maritim di Arktik berupa FONOP, eksplorasi migas, perpanjangan wilayah laut teritorial, hingga jalur pelayaran baru. Dalam mencapai kepentingannya, AS membuat serangkaian kebijakan yang memerlukan adanya kehadiran aktif AS di kawasan Arktik terutama dalam peningkatan infrastruktur atau kapabilitas militer hingga peranannya di Arctic Council seiring dengan mencairnya es dan isu lingkungan serta perkembangan aktivitas Russia dan China. Kendati demikian, usaha AS dalam mencapai kepentingannya di Arktik tidak diiringi oleh implementasi yang kuat, terutama dalam hal kapabilitas militer yang jauh dari negara Arktik lainnya sehingga tidak maksimal. Selain itu, langkah AS yang tidak meratifikasi UNCLOS dan perbedaan kebijakan luar negeri AS-Arktik antara Obama-Trump turut memengaruhi pengaruh AS di kawasan Arktik. Kompleksitas di isu Arktik menuntut AS untuk mengambil sikap dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya ditengah kondisi internasional yang kompetitif serta cepatnya dampak dari perubahan iklim.

Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan penulis berusaha untuk menjelaskan bagaimana kawasan Arktik berkembang seiring dengan dampak dari perubahan iklim yang membuka sederet potensi yang belum tereksplorasi oleh manusia seperti cadangan migas, jalur pelayaran baru, dan perpanjangan wilayah teritorial. Penelitian ini kemudian berfokus pada AS sebagai negara dengan kekuatan maritim yang besar serta kebijakan luar negerinya dalam merespon isu Arktik sekaligus mencapai kepentingan nasionalnya di Arktik. Peneliti akan membatasi periodisasi penelitian hanya di era Obama II dan Trump, yakni di tahun 2013-2019, sebab merupakan tahun krusial bagi kepemimpinan AS di Arctic Council, meningkatnya aktivitas militer Russia, masuknya China di Arktik, serta perubahan pendekatan kebijakan AS akibat pergantian presiden dari Obama menuju Trump.

I.2 Rumusan Masalah

Proses mencairnya es di Laut Arktik membuat AS terus meninjau ulang kebijakan luar negerinya di kawasan Arktik. Hal ini disebabkan karena krusialnya kawasan Arktik dari sisi potensi eksplorasi migas, jalur pelayaran baru, hingga

perpanjangan wilayah laut teritorial atas dasar *Continental Shelf*. Hal inilah yang direspon masing-masing presiden yang terbagi dalam 2 rezim yakni Obama II (2013-2016) melalui NSAR-2013 dan Trump melalui DOD 2016 serta DOD 2019 (2016-2020). Ketiga dokumen kebijakan ini memiliki instrumen yang berbeda terutama dalam penggunaan Arctic Council, kapabilitas militer, serta respon terhadap perubahan lingkungan eksternal yang terjadi khususnya pada aktivitas China dan Russia. Terdapat perbedaan pendekatan kebijakan luar negeri Arktik-AS di era Obama II dan Trump yakni berdasarkan kerjasama dan diplomasi serta kompetitif. Di sisi lain, AS juga dituntut untuk berperan lebih dalam forum Arctic Council serta memperbarui kapabilitas militernya di Arktik yang tertinggal jauh dari negara lainnya meskipun salah satu fokus kebijakannya adalah memberi kehadiran yang aktif (*Active Presence*) di kawasan Arktik. AS dinilai memiliki kepentingan nasional yang jelas namun terbatas di Arktik. Hal ini didukung dengan berubahnya pendekatan, instrumen, dan kebijakan yang digunakan oleh masing-masing presiden dan tantangan implementasinya di Arktik. Oleh karena itu, penulis berusaha membahas permasalahan ini melalui pertanyaan penelitian **‘Bagaimana perbedaan model kebijakan luar negeri AS terhadap kawasan Arktik di era Obama II dan Trump?’**

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Memahami perkembangan Arktik sebagai kawasan strategis.
2. Menganalisa perbedaan model kebijakan luar negeri Arktik-AS di era Obama II dan Trump.
3. Menentukan faktor penentu perbedaan kebijakan luar negeri Obama II dan Trump di Arktik.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. **Manfaat Akademis:** Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mengisi kekosongan celah literatur mengenai analisa perbedaan kebijakan luar

negeri AS di Arktik di era Obama II dan Trump dan kajian hubungan internasional di wilayah Arktik yang muncul sebagai kawasan strategis seiring dengan meningkatnya pengaruh perubahan iklim.

- 2. Manfaat Praktis:** Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai acuan bagi para pembuat kebijakan dalam membuat suatu keputusan melalui model kebijakan luar negeri adaptif khususnya dalam merespon isu di kawasan Arktik.

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman menyeluruh mengenai topik permasalahan penelitian yang dibahas, peneliti membagi laporan penelitian skripsi ini dalam 6 bab dengan sub-bab yang berkaitan satu dengan lainnya agar hasil yang diciptakan lebih komprehensif. Bab-bab tersebut antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang topik penelitian mengenai bagaimana kawasan Arktik berkembang menjadi salah satu kawasan strategis berikut potensi yang ditawarkan seiring dengan proses mencairnya lapisan es akibat perubahan iklim. Bab ini kemudian menjelaskan mengenai perkembangan kebijakan luar negeri AS di Arktik pada masa Obama II dan Trump, keberadaan Arctic Council, hingga aktivitas China dan Russia yang dijelaskan melalui berbagai penelitian terdahulu. Bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian skripsi yang dibagi dalam sub-bab tertentu.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kerangka pemikiran yang berisi teori dan konsep yang digunakan penulis yakni teori kekuatan maritim dan model kebijakan luar negeri adaptif, alur pemikiran yang disajikan dalam bentuk gambar agar mudah dipahami.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini mencakup pembahasan mengenai objek penelitian, jenis penelitian, teknik

pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, serta tabel rencana waktu yang berisi rencana penelitian.

BAB IV: ANALISIS POTENSI KAWASAN ARKTIK

Bab ini membahas mengenai dinamika kawasan Arktik secara umum seiring dengan proses mencairnya es, serta potensi kawasan Arktik dari sisi ekonomi dan keamanan yang dianalisa melalui teori kekuatan maritim. Bab ini menjelaskan mengenai potensi Arktik yang dibagi dalam beberapa sub-bab yakni: potensi rute pelayaran baru, potensi eksplorasi migas, dan potensi perpanjangan laut teritorial. Bab ini menjelaskan bagaimana AS mempersepsikan Laut Arktik sebagai bagian dari kepentingan kebebasan navigasinya serta langkahnya dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan.

BAB V: ANALISIS KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT DI ARKTIK

Bab ini berisi mengenai analisa kebijakan AS sejak pemerintahan Obama II hingga Trump menggunakan model kebijakan luar negeri adaptif. Bab ini menganalisa perbedaan kebijakan luar negeri Obama II dan Trump yang dipengaruhi perubahan di lingkungan internal dan eksternal di eranya. Setelah itu, penulis berusaha menganalisa faktor penentu perbedaan kebijakan luar negeri antara Obama dan Trump. Berikut rincian sub-bab Analisa Kebijakan AS di Arktik:

- Kebijakan AS-Arktik Obama II
- Kebijakan AS-Arktik: Trump
- Faktor Penentu Perbedaan Kebijakan Luar Negeri Arktik-AS: Obama II dan Trump

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran yang disajikan oleh peneliti berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA